



Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Melalui Pelatihan di Desa Oelami Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara

Improving the Accountability of Village Fund Management Through Training in Oelami Village, South Bikomi District, North Central Timor Regency

Handrianus Vianey Melin Wula^{1*}, Elpius Kalembang²,
Fransiskus Atok³, Fetronela Rambu Bobu⁴

¹⁻³ Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

⁴ Teknik Informatika, Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan

¹⁻⁴ Universitas Timor, Indonesia

* Penulis Korespondensi: handrywula@unimor.ac.id¹

Article History:

Naskah Masuk: 08 Oktober 2025;

Revisi: 06 November 2025;

Diterima: 03 Desember 2025;

Tersedia: 10 Desember 2025

Keywords:

Accountability;

Financial;

Management;

Training;

Village Funds

Abstract: Proper management of Village Funds plays a crucial role in improving development outcomes and community welfare at the village level. Although the Indonesian government has allocated Village Funds to strengthen rural development, many villages continue to face various challenges in managing these resources effectively. The community service program carried out in Oelami Village, Bikomi Selatan Subdistrict, North Central Timor Regency, was designed to enhance the capacity of village officials in managing Village Funds more efficiently. Using the Participatory Learning and Action (PLA) approach, participants received guidance on village financial planning, implementation, and reporting, with a strong emphasis on transparency and accountability. The training resulted in improved understanding among village officials in preparing the APBDes, monitoring program implementation, and drafting accountability reports. Participants also demonstrated strong engagement and began to recognize that accountable financial management is not only about complying with regulations but also about building public trust and accelerating development in the village.

Abstrak

Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan secara benar sangat menentukan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa untuk memperkuat pembangunan di wilayah pedesaan, dalam praktiknya masih banyak desa yang mengalami berbagai kendala dalam proses pengelolaannya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Oelami, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara ini dirancang untuk membantu meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam mengelola Dana Desa secara lebih efektif. Dengan menggunakan pendekatan Participatory Learning and Action (PLA), para peserta diberi pendampingan terkait perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan desa yang menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setelah mengikuti pelatihan, terlihat adanya peningkatan pemahaman perangkat desa dalam menyusun APBDes, memonitor pelaksanaan program, dan menyusun laporan pertanggungjawaban. Para peserta juga menunjukkan partisipasi yang sangat baik dan mulai menyadari bahwa pengelolaan keuangan desa yang akuntabel bukan hanya memenuhi aturan, tetapi juga berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat serta mempercepat pembangunan di desa.

Kata kunci: Akuntabilitas; Dana Desa; Keuangan; Pelatihan; Pengelolaan

1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa kini menjadi salah satu fokus utama pemerintah Indonesia dalam upaya memperkuat perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, desa-desa di seluruh Indonesia mulai menerima Dana Desa dari pemerintah pusat. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan di tingkat desa dan memberikan ruang bagi desa untuk mengelola pembangunan sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing (Faiz et al., 2021).

Pemerintah mulai mengalokasikan Dana Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai bentuk komitmen nyata dalam mendorong pembangunan di tingkat desa. Dana tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membangun berbagai infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan publik, serta menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada potensi lokal (Lamuda et al., 2022; Sonbay et al., 2023). Dengan pengelolaan yang efektif, Dana Desa dapat menjadi pendorong penting bagi desa untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan membangun kemandirian desa. Selain itu, keberadaan Dana Desa juga memberi peluang bagi warga untuk terlibat langsung dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Keterlibatan ini menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam menjaga serta memanfaatkan hasil pembangunan yang telah diwujudkan (Anggraini et al., 2024).

Namun, mengelola Dana Desa dengan baik bukanlah tugas yang sederhana. Setiap tahap mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan menuntut transparansi dan akuntabilitas agar penggunaannya benar-benar sesuai kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan (Alfirdaus & Yuwono, 2020; Savitri et al., 2022). Aparatur desa perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara cermat, menjalankan program yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta menyiapkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat maupun pemerintah (Sululing, 2018). Di sinilah letak tantangannya tidak semua perangkat desa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola keuangan desa (Maryono et al., 2023; Yuliani et al., 2021). Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan bagi aparatur desa menjadi sangat diperlukan agar penggunaan Dana Desa benar-benar tepat sasaran. Dengan pengelolaan yang baik, Dana Desa mampu berfungsi sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan di tingkat desa (Dwi R.T et al., 2021).

Namun, dalam pelaksanaannya, pengelolaan Dana Desa masih dihadapkan pada

berbagai tantangan. Salah satu persoalan yang paling sering muncul adalah terbatasnya pemahaman aparatur desa mengenai mekanisme perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku. Situasi ini juga terlihat di Desa Oelami, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, di mana keterbatasan pengetahuan dan keterampilan perangkat desa menjadi perhatian utama. Banyak aparatur desa yang masih mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan serta mempertanggungjawabkan penggunaannya secara transparan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Tim Pengabdian kepada Masyarakat dari Universitas Timor menyelenggarakan kegiatan pendampingan terkait pengelolaan Dana Desa di Desa Oelami. Melalui pelatihan ini, aparatur desa diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dalam mengelola keuangan desa secara akuntabel serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Oelami, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara. Pelatihan tersebut diikuti oleh 13 peserta yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketua PKK, serta beberapa tokoh masyarakat. Dari total peserta, 10 orang merupakan laki-laki dan 3 orang perempuan, dengan rentang usia antara 30 hingga 55 tahun.

Pelatihan ini menggunakan pendekatan Participatory Learning and Action (PLA), yang terbukti efektif dalam memperkuat pemahaman para peserta. Melalui pendekatan ini, peserta didorong untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar melalui diskusi kelompok, simulasi, dan studi kasus yang disesuaikan dengan konteks dan kondisi lokal (Silmi, 2017). Metode ini memungkinkan peserta untuk secara langsung mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang mereka hadapi, sehingga materi yang disampaikan menjadi lebih relevan, kontekstual, dan mudah dipahami (Juniawan et al., 2021).

3. HASIL

Tahap Persiapan Kegiatan

Tim Pengabdian kepada Masyarakat terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menentukan waktu dan lokasi kegiatan. Setelah itu, berbagai perlengkapan pendukung seperti laptop, LCD projector, sound system, materi pelatihan, dan instrumen evaluasi dipersiapkan agar pelatihan dapat berjalan dengan lancar.

Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dalam satu hari penuh, pukul 09.30-16.00 WITA, dengan materi sebagai berikut:

Sesi I: Pengenalan Akuntabilitas Dana Desa Pelaksanaan

Sesi pertama membahas tentang pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan observasi, peserta aktif bertanya mengenai prosedur penggunaan dana desa yang sah. Pre-test menunjukkan hanya 40% peserta yang memahami prinsip akuntabilitas sebelum pelatihan. Setelah sesi pertama, pemahaman ini meningkat menjadi 85% berdasarkan hasil post-test.



Gambar 1. Proses penyampaian materi akuntabilitas dalam pengelolaan dana Desa

Berikut grafik tentang pemahaman peserta kegiatan yang menunjukkan hasil peningkatan skor pemahaman akuntabilitas:



Grafik 1. Peningkatan Pemahaman Akuntabilitas Dana Desa Sebelum dan Sesudah Pelatihan.

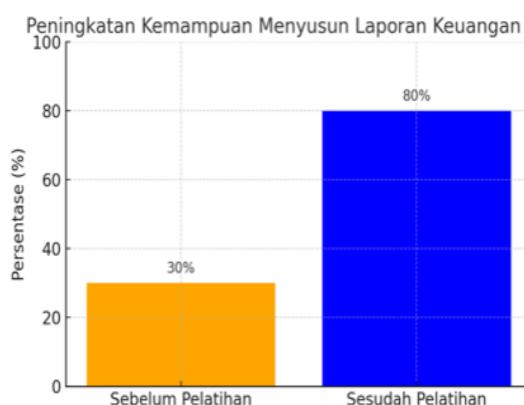
Sesi II: Teknik Penyusunan Laporan Keuangan Desa

Pada sesi kedua, peserta berlatih menyusun laporan keuangan desa menggunakan contoh format APBDes. Awalnya, hanya 30% peserta yang memahami struktur APBDes. Setelah pelatihan, sebanyak 80% peserta mampu menyusun laporan keuangan desa sederhana secara mandiri.



Gambar 2. Pelatihan penyusunan laporan keuangan Desa

Berikut adalah grafik Peningkatan Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan Desa:



Grafik 2. Peningkatan kemampuan peserta dalam menyusun laporan keuangan desa sebelum dan sesudah pelatihan.

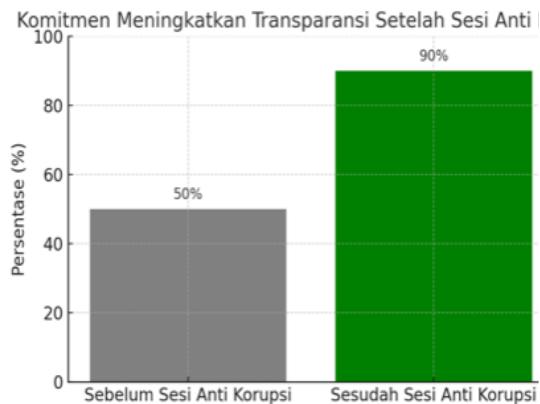
Sesi III: Pendidikan Anti Korupsi bagi Aparatur Desa

Materi anti korupsi menjadi sesi yang menarik antusiasme peserta. Banyak pertanyaan yang diajukan terkait contoh kasus korupsi dana desa di daerah lain. Peserta menyadari pentingnya integritas dalam mengelola dana publik. Observasi menunjukkan bahwa setelah sesi ini, lebih dari **90% peserta** menyatakan komitmen untuk meningkatkan transparansi dalam tugasnya.



Gambar 3. Pelatihan Pendidikan anti korupsi

Berikut grafik tentang Komitmen Peserta dalam Meningkatkan Transparansi Setelah Sesi Anti Korupsi:



Grafik 3. Komitmen Peserta dalam Meningkatkan Transparansi Setelah Sesi Anti Korupsi.

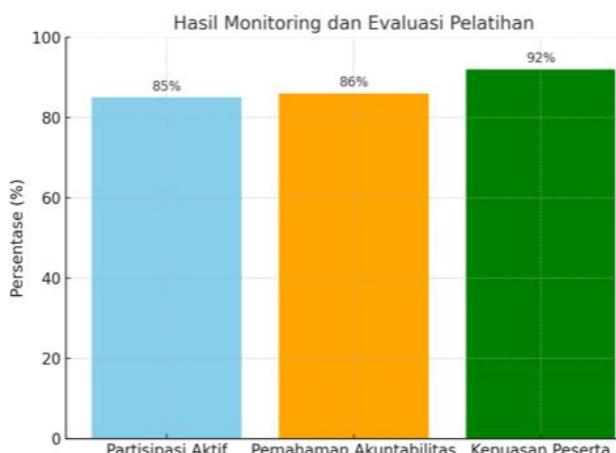
Tahap Monitoring dan Evaluasi

Monitoring kegiatan menunjukkan bahwa metode participatory learning efektif dalam meningkatkan partisipasi aktif peserta. Hasil evaluasi menggunakan pre-test dan post-test membuktikan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta tentang akuntabilitas dan pengelolaan dana desa.



Gambar 4. Monitoring dan evaluasi

Secara keseluruhan, tingkat kepuasan peserta terhadap pelatihan ini mencapai 92%, berdasarkan hasil wawancara singkat di akhir sesi. Yang dapat dilihat pada gambar 4 yang menyajikan hasil monitoring dan evaluasi selama dan setelah pelaksanaan pelatihan.



Grafik 4. menyajikan hasil monitoring dan evaluasi selama dan setelah pelaksanaan pelatihan.

4. PEMBAHASAN

Peningkatan Pemahaman tentang Akuntabilitas Dana Desa

Pelaksanaan Sesi I: Pengenalan Akuntabilitas Dana Desa menunjukkan hasil yang sangat positif. Pada awal kegiatan, hanya sekitar 40% peserta yang memahami prinsip dasar akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Setelah mengikuti sesi pelatihan, angka tersebut meningkat menjadi 85%, berdasarkan hasil post-test. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan berhasil membantu peserta memahami pentingnya tanggung jawab dan keterbukaan dalam setiap proses pengelolaan dana publik di tingkat desa.

Keberhasilan tersebut tidak lepas dari pendekatan partisipatif yang diterapkan selama sesi. Peserta tidak hanya mendengarkan pemaparan materi, tetapi juga aktif berdiskusi, bertanya, dan berlatih secara langsung. Metode ini membuat peserta lebih mudah memahami konsep akuntabilitas karena materi disampaikan secara kontekstual, sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Hal ini sejalan dengan temuan Susano & Rachmawati yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan Dana Desa berkontribusi pada meningkatnya transparansi dan akuntabilitas (Susano & Rachmawati, 2024).

Selain itu, Diskon Sitinjak et al., juga menegaskan bahwa pelatihan berbasis *Participatory Learning and Action* (PLA) mampu memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya secara terbuka dan berkelanjutan (Diskon Sitinjak et al., 2025). Dengan kata lain, semakin besar partisipasi warga dalam proses pembelajaran, semakin tinggi pula kesadaran dan tanggung jawab mereka dalam tata kelola keuangan desa.

Secara keseluruhan, hasil peningkatan pemahaman dari 40% menjadi 85% membuktikan bahwa metode pelatihan partisipatif dan kontekstual sangat efektif. Sesi pertama ini menjadi landasan penting untuk pelatihan berikutnya, sekaligus memperlihatkan bahwa

akuntabilitas bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi sebuah nilai yang perlu ditanamkan dan dipraktikkan bersama. Dengan model pelatihan seperti ini, diharapkan pengelolaan Dana Desa ke depan semakin transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

Peningkatan Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Desa

Pelaksanaan Sesi II: Penyusunan Laporan Keuangan Desa menunjukkan peningkatan kemampuan peserta yang cukup signifikan. Sebelum pelatihan dimulai, hanya sekitar 30% peserta yang memahami struktur dasar APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) serta cara menyusunnya sesuai ketentuan. Kondisi ini mencerminkan bahwa sebagian besar aparatur desa masih mengalami kesulitan dalam pengelolaan administrasi keuangan secara formal. Setelah pelatihan berlangsung, tingkat pemahaman peserta meningkat menjadi 80%, yang menandakan adanya peningkatan kemampuan sebesar 50 poin persentase.

Keberhasilan ini tidak lepas dari pendekatan partisipatif dan aplikatif yang digunakan selama kegiatan. Peserta tidak hanya menerima teori, tetapi juga dilibatkan langsung dalam simulasi penyusunan laporan keuangan, diskusi, serta praktik menggunakan format APBDes yang nyata. Pendekatan ini membantu peserta belajar secara kontekstual dan memahami langkah-langkah pelaporan secara lebih konkret. Banyak peserta juga mengakui bahwa pelatihan seperti ini merupakan pengalaman pertama mereka dalam mendapatkan bimbingan teknis yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Jika dibandingkan dengan Sesi I, terlihat adanya keterkaitan yang kuat antara pemahaman nilai akuntabilitas dan keterampilan teknis penyusunan laporan keuangan. Pada sesi pertama, peserta belajar mengenai pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan Dana Desa. Pemahaman tersebut kemudian diterapkan dalam sesi kedua melalui praktik langsung menyusun laporan keuangan. Artinya, pelatihan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga membangun kesadaran bahwa akuntabilitas harus diwujudkan dalam tindakan nyata.

Meskipun hasilnya sudah baik, tetapi masih ditemukan beberapa kendala, terutama karena sebagian peserta belum terbiasa dengan kode-kode rekening APBDes. Untuk membantu mengatasi hal ini, tim pengabdian kepada masyarakat menyediakan modul praktis berisi panduan dan contoh pengisian laporan keuangan desa. Upaya ini diharapkan dapat membantu peserta saat kembali ke desa masing-masing.

Hasil pelatihan ini sejalan dengan temuan Ritonga et al, yang menunjukkan bahwa pelatihan dan bimbingan teknis secara rutin sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan aparatur desa mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Secara keseluruhan,

keterpaduan antara pemahaman akuntabilitas (sesi pertama) dan kemampuan teknis pelaporan (sesi kedua) menjadi bukti bahwa pendekatan pembelajaran berbasis praktik mampu membangun tata kelola keuangan desa yang lebih terbuka, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Penanaman Nilai Anti Korupsi pada Aparatur Desa

Sesi materi anti korupsi menjadi salah satu bagian pelatihan yang paling diminati oleh peserta. Antusiasme terlihat jelas dari banyaknya pertanyaan yang diajukan, terutama mengenai contoh kasus korupsi Dana Desa yang pernah terjadi di daerah lain. Melalui diskusi tersebut, peserta mulai menyadari betapa pentingnya integritas dan transparansi dalam mengelola dana publik. Mereka memahami bahwa menjaga kepercayaan masyarakat bukan hanya soal menjalankan aturan, tetapi juga tentang sikap jujur dan tanggung jawab dalam setiap keputusan.

Sebelum sesi ini dimulai, tingkat kesadaran peserta terhadap pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan Dana Desa masih tergolong rendah hanya sekitar 50% yang benar-benar memahami maknanya. Namun setelah pelatihan berlangsung, angka tersebut meningkat pesat menjadi lebih dari 90%. Peningkatan sebesar 40 poin persentase ini menunjukkan bahwa pendekatan pelatihan yang berbasis diskusi, studi kasus nyata, dan refleksi nilai-nilai moral sangat efektif dalam membangun kesadaran etis aparatur desa.

Sesi ini juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan dua sesi sebelumnya. Jika pada sesi pertama peserta belajar tentang akuntabilitas, dan pada sesi kedua mereka mengasah kemampuan teknis dalam menyusun laporan keuangan secara transparan, maka sesi anti korupsi ini memperkuat aspek moral dan integritas pribadi. Dengan demikian, peserta tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga memiliki landasan nilai yang kuat untuk mencegah terjadinya praktik koruptif dalam pengelolaan Dana Desa.

Pendekatan pelatihan yang partisipatif dan reflektif terbukti mampu menggugah kesadaran peserta untuk menjadikan transparansi sebagai budaya kerja, bukan sekadar kewajiban administratif. Mereka menyadari bahwa keterbukaan adalah cara terbaik untuk membangun kepercayaan publik dan tata kelola desa yang bersih. Hasil ini sejalan dengan temuan Taufik & Nurwahidah yang menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi berperan penting dalam memperkuat budaya kerja berintegritas di pemerintahan lokal (Taufik & Nurwahidah, 2023).

Secara keseluruhan, sesi ini memberikan dampak yang nyata. Peserta tidak hanya memahami bahaya korupsi, tetapi juga berkomitmen untuk menjadi bagian dari perubahan. Oleh karena itu, pendidikan nilai antikorupsi seperti ini perlu terus diperkuat dalam setiap

program pelatihan aparatur desa agar terbangun budaya pemerintahan yang jujur, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Monitoring dan Evaluasi

Hasil monitoring dan evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa metode *Participatory Learning and Action (PLA)* berjalan sangat efektif dalam meningkatkan partisipasi aktif para peserta. Pendekatan ini membuat proses pelatihan menjadi lebih hidup karena peserta tidak hanya mendengarkan materi, tetapi juga ikut terlibat langsung melalui diskusi, simulasi, dan refleksi bersama. Dengan cara ini, suasana belajar terasa lebih terbuka dan kolaboratif, sehingga peserta dapat saling bertukar pengalaman dan memperdalam pemahaman mereka tentang akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.

Dari hasil observasi lapangan, tingkat partisipasi aktif peserta mencapai 85%. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta terlibat secara aktif, baik saat berdiskusi maupun ketika mengikuti praktik penyusunan laporan keuangan desa. Antusiasme mereka terlihat dari banyaknya pertanyaan dan contoh nyata yang dibagikan selama kegiatan berlangsung.

Selain itu, hasil pre-test dan post-test memperlihatkan adanya peningkatan yang cukup besar dalam pemahaman peserta. Jika sebelum pelatihan nilai rata-rata hanya 52%, setelah pelatihan meningkat menjadi 86%. Peningkatan ini menjadi bukti nyata bahwa metode yang digunakan tidak hanya menarik, tetapi juga efektif dalam memperkuat pengetahuan dan keterampilan peserta terkait akuntabilitas dan tata kelola keuangan desa.

Di akhir kegiatan, hasil wawancara singkat menunjukkan bahwa 92% peserta merasa puas dengan pelatihan yang diberikan. Mereka menilai materi pelatihan sangat relevan dengan tugas mereka di desa dan disampaikan dengan cara yang mudah dipahami, praktis, serta langsung bisa diterapkan. Banyak peserta juga menyampaikan bahwa mereka lebih termotivasi untuk mengelola dana publik secara transparan dan bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, hasil ini memperlihatkan bahwa pendekatan pelatihan partisipatif seperti PLA tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis aparatur desa, tetapi juga membangun semangat kebersamaan dan komitmen untuk bekerja dengan lebih terbuka dan jujur. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa metode pembelajaran berbasis partisipasi perlu terus dikembangkan agar aparatur desa semakin siap mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

5. KESIMPULAN

Pelatihan pengelolaan Dana Desa berbasis akuntabilitas di Desa Oelami memberikan hasil yang sangat positif. Kegiatan ini terbukti mampu meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan keuangan desa dengan lebih baik. Berdasarkan hasil evaluasi, terjadi peningkatan pemahaman tentang prinsip akuntabilitas sebesar 34%, serta peningkatan kemampuan menyusun laporan keuangan desa sebesar 50%. Hasil ini menunjukkan bahwa pelatihan benar-benar membantu peserta memahami bagaimana Dana Desa seharusnya dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain peningkatan kemampuan teknis, pelatihan ini juga berhasil menumbuhkan kesadaran dan nilai-nilai anti korupsi di kalangan aparatur desa. Melalui diskusi dan studi kasus, para peserta semakin memahami bahwa integritas dan transparansi adalah kunci dalam membangun pemerintahan desa yang bersih dan dipercaya oleh masyarakat.

Pendekatan Participatory Learning and Action (PLA) yang digunakan dalam kegiatan ini juga terbukti efektif. Peserta tidak hanya mendengarkan materi, tetapi terlibat langsung dalam praktik, simulasi, dan refleksi bersama. Cara ini membuat proses belajar terasa lebih hidup dan bermakna, karena peserta dapat langsung mengaitkan materi dengan situasi nyata di desa mereka masing-masing.

Sebagai tindak lanjut dari pelatihan ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- a) Durasi pelatihan sebaiknya diperpanjang agar pembahasan materi dan praktik dapat dilakukan lebih mendalam.
- b) Penyediaan modul atau buku saku praktis sangat diperlukan sebagai panduan aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa sehari-hari.
- c) Pelatihan lanjutan disarankan untuk mencakup bidang lain, seperti pengelolaan aset desa dan pelayanan publik berbasis digital, agar kapasitas aparatur desa semakin luas dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menjadi langkah penting menuju pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pelatihan semacam ini juga bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain yang ingin memperkuat tata kelola dan kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan Dana Desa yang lebih baik.

REFERENCES

- Alfirdaus, L. K., & Yuwono, T. (2020). MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA, MENGEFEKTIFKAN DANA DESA. 01(04).
- Anggraini, L. D., Wulandari, T., Purnamasari, E. D., & Faradillah, F. (2024). PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DI DESA LEMBAK KABUPATEN MUARA ENIM. RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(1), 111–118. <https://doi.org/10.46576/rjkpm.v5i1.3700>
- Diskon S., et al. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Pelatihan Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Usaha Bersama: Pengabdian. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 3(4), 2475–2480. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.945>
- Dwi R.T, D. R., Napisah, L. S., & Rakhmadhani, V. (2021). PENDAMPINGAN PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) ABADI JAYA DESA SUKAJAYA LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT. Jurnal Berdaya Mandiri, 3(2), 613–622. <https://doi.org/10.31316/jbm.v3i2.1785>
- Faiz, I. A., Zamzami, F., Natasari, D., & Wulandari, R. (2021). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa, Desa Sidoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat, 3(2), 455. <https://doi.org/10.22146/jp2m.51199>
- Juniawan, F. P., Marini, M., Sylfania, D. Y., Antonius, F. R., & Gautama, S. (2021). Penerapan Metode Participatory Learning and Action (PLA) pada Pelatihan Uji Kompetensi Kejuruan. JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia), 2(4), 257–265. <https://doi.org/10.36596/jpkmi.v2i4.215>
- Lamuda, I., Abdullah, J., Hasan, W., & Rahman, Z. (2022). Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa. Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian, 2(1), 41. <https://doi.org/10.37905/dikmas.2.1.41-48.2022>
- Maryono, M., Bagana, B. D., & Santosa, A. B. (2023). Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Mengawal Dana Desa Menuju Masyarakat Desa Sejahtera. Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(3), 96–101. <https://doi.org/10.38142/ahjpm.v2i3.874>
- Savitri, E., Andreas, A., & Diyanto, V. (2022). Pendampingan Pelaporan Keuangan BUMDes Berbasis Web. Journal of Community Engagement Research for Sustainability, 2(6), 268–277. <https://doi.org/10.31258/cers.2.6.268-277>
- Silmi, A. F. (2017). PARTICIPATORY LEARNING AND ACTION (PLA) DI DESA TERPENCIL: Peran LSM PROVISI Yogyakarta dalam Pemberdayaan Masyarakat di Lubuk Bintialo, Sumatra Selatan. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan, 1(1), 97. <https://doi.org/10.14421/jpm.2017.011-05>
- Sonbay, Y. Y., Manehat, B. Y., Moi, M. O. V., Lian, Y. P., Nay, Y. A., Pah, V. C., & Dawu, L. M. T. (2023). PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENGATASI

STUNTING DI DESA POLLO. 6.

Sululing, S. (2018). SOSIALISASI MODEL PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka, 1(1). <https://doi.org/10.51213/jmm.v1i1.6>

Susano, A., & Rachmawati, M. (2024). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA MELALUI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES). EKOBIS: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi, 12(1), 50–58. <https://doi.org/10.36596/ekobis.v12i1.1382>

Taufik, T., & Nurwahidah, N. (2023). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Bagi Perangkat Desa Sebagai Strategi Pencegahan Korupsi. JPIn: Jurnal Pendidik Indonesia, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.47165/jpin.v6i1.479>

Yuliani, R., Binti, R. E., Limarjani, S., Misra, A., Hardy, E., Sari, N. A., & Yasin, M. (2021). Digitalisasi Laporan Keuangan BUMDes Kayu Bawang. Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul), 1(1), 47. <https://doi.org/10.20527/ilung.v1i1.3459>